

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perang merupakan fenomena yang universal. Umur perang bahkan sama tuanya dengan umur manusia itu sendiri. Sejarah politik internasional memang ditandai dengan kooperasi dan kompetisi atau bahkan konfrontasi antar negara. Jika dua negara terlibat dalam suatu konflik kepentingan maka hanya ada dua jalan yang dapat ditempuh. Pertama, kedua negara tersebut melakukan penyelesaian politik lewat diplomasi. Atau bila jalan pertama ini gagal maka jalan kedua adalah konfrontasi militer (perang) di mana salah satu pihak dapat mencapai tujuan setelah memenangkan perang tersebut sehingga perang sering dianggap sebagai kelanjutan politik antar bangsa dengan menggunakan kekerasan, sebagaimana dikatakan oleh Von Clausewitz.¹ Perang memang masih merupakan alternatif dominan dalam suatu perselisihan.

Sejak kalah dalam perang saudara tahun 1949, pemerintahan Nasionalis Kuomintang melarikan diri ke Taiwan dan mendirikan satu pemerintahan sendiri yang terpisah dengan China Daratan. Namun keinginan Taiwan untuk mendirikan sebuah negara independen yang terlepas dari RRC terus ditentang oleh RRC. RRC terus mengusahakan suatu reunifikasi dengan Taiwan dengan memberikan tawaran-tawaran yang cukup menarik bagi Taiwan, seperti SAR (*Special Administration Region*) dan *One Country Two System* kepada Taiwan. Namun

¹ Amien Rais, *Politik Internasional Dewasa Ini*, Surabaya, Usaha Nasional, 1989, hal 13

tawaran-tawaran tersebut ternyata ditolak oleh Taiwan. Bahkan Taiwan mulai meningkatkan kekuatan militernya untuk mengimbangi kekuatan militer RRC.

Berawal dari hal tersebut, penulis mencoba untuk meneliti tentang “Perimbangan Kekuatan Militer RRC-Taiwan” sebagai judul skripsi yang akan ditulis.

B. Tujuan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini penulis dapat :

1. memberi deskriptif tentang perkembangan situasi politik RRC-Taiwan
2. memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat politik militer dan keamanan antara RRC-Taiwan
3. melengkapi tugas akhir untuk memperoleh gelar kesarjanaan dan sekaligus manifestasi penerapan dan pengembangan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa pendidikan

C. Latar Belakang Masalah

Taiwan dulu adalah salah satu propinsi dari China Daratan. Namun setelah terjadinya perang saudara tahun 1949 Taiwan terpisah dari China Daratan dan mendirikan negara sendiri.

Taiwan sebenarnya adalah nama sebuah pulau (dulu disebut pulau Formosa). Namun pada perkembangannya Taiwan lebih dikenal sebagai negara kecil yang terpisah dari China Daratan. Nama Taiwan di dunia internasional digunakan untuk menyebut Republic of China (ROC) untuk menghindari

kesalahan penyebutan dengan Republik Rakyat China (RRC) yang berdiri di China Daratan. Wilayah Taiwan meliputi Pulau Formosa (Taiwan), Pulau Penghu (Pescadores) yang terdiri dari 60 buah pulau kecil dan 21 lebih pulau lainnya yang tercecer di sekitarnya.

Taiwan dulu pernah diduduki oleh Belanda pada tahun 1624 dan 1641, serta Spanyol pada tahun 1626. Kemudian pada saat terjadi perang antara China dan Jepang pada tahun 1894-1895, China mengalami kekalahan. Sebagai konsekuensinya China harus menyerahkan Taiwan pada tanggal 18 Mei 1895 sebagai syarat kekalahan. Namun pasca Perang Dunia II Taiwan dikembalikan pada China karena Jepang mengalami kekalahan pada Perang Dunia II.

Setelah Perang Dunia II ada dua golongan yang tumbuh berkembang di China, yaitu golongan nasionalis dan golongan komunis. Dalam perjalanannya antara kedua golongan tersebut terjalin kerjasama sekaligus terjadi persaingan. Setelah Perang Dunia II berakhir, kaum komunis pimpinan Mao Zedong mencoba menggulingkan pemerintahan yang sah yaitu dari Partai Nasionalis Kuo Min Tang (KMT) pimpinan Chiang Kai-shek.

Dalam perang saudara yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949 tersebut kaum komunis berhasil mengalahkan KMT di tahun 1949. Chiang dengan sisa-sisa pasukannya melarikan diri ke Taiwan (Formosa) dan menundukkan pulau tersebut, kemudian mendirikan suatu pemerintahan sendiri dengan nama Republic of China (ROC) pada tanggal 18 Desember 1949 di bawah pimpinan Chiang Kai-shek bersama Chiang Ching-kuo. Sedangkan di China daratan berdiri Republik Rakyat China (RRC) dengan Mao Ze Dong sebagai presiden.

KMT di Taiwan mendapat perlindungan dari armada ke tujuh Amerika Serikat yang sejak tahun 1950 telah melindungi KMT terhadap serangan-serangan dari RRC. Dari pandangan RRC tindakan AS itu dianggap merupakan campur tangan yang tidak pada tempatnya yang mengingkari hak rakyat RRC untuk menyelesaikan revolusi mereka sendiri.² Sejak saat itu China terpecah menjadi dua yaitu RRC dan Republic of China (ROC) atau Taiwan. Keduanya mengklaim bahwa masing-masing negara adalah satu-satunya wakil sah dari China.

Antara RRC dan Taiwan saling bersaing dalam mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatan masing-masing negara. Namun dari pihak RRC tetap tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang independen. Bahkan RRC berhasil menekan pemerintahan-pemerintahan di dunia untuk memilih antara RRC atau Taiwan sebagai "teman". Usaha RRC dalam mendapatkan kembali pengakuan internasional telah mendapatkan hasil. Keberhasilan itu dapat dilihat dari masuknya delegasi RRC dalam Dewan Keamanan PBB menggantikan delegasi Taiwan, pembukaan hubungan diplomatik resmi dengan hampir seluruh negara kapitalis besar, dan menjelang akhir tahun 1985 RRC memiliki hubungan diplomatik dengan 130 negara yang mewakili aneka bentuk pemerintahan dari komunis sampai kediktatoran sayap kanan.³

Sedangkan Taiwan sampai dengan saat ini hanya diakui oleh 25 negara yang sebagian besar adalah negara kecil di Afrika dan Amerika Tengah. Selama ini Taiwan hanya menjadi sebuah kekuatan ekonomi dan perdagangan yang diperhitungkan secara regional maupun global, tapi tanpa memiliki identitas

² Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional : Persepsi Nasional*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hal 176

³ *ibid*, hal 192

permasalahan dengan hipotesa. Untuk menjawab permasalahan di atas penulis mencoba menggunakan *Decision Making Theory* dan Konsep Kepentingan Nasional

1. Decision Making Theory

Penggunaan teori ini didasarkan pada kebijakan dalam negeri Taiwan dalam mengambil tindakan mengimbangi kekuatan militer RRC. Walaupun sampai saat ini kedaulatan pemerintahan Taiwan belum sepenuhnya didapat tetapi dalam hal ini pemerintahan Taiwan dianggap sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemerintahan RRC untuk menentukan nasibnya.

Decision Making Theory menurut William D. Coplin:⁸

“Apabila kita akan menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara maka kita harus mempertanyakan para pemimpin negara dalam membuat kebijakan luar negeri. Dan salah besar jika menganggap bahwa para pemimpin negara (para pembuat kebijakan luar negeri) bertindak tanpa pertimbangan (konsiderasi). Tetapi sebaliknya tindakan politik luar negeri tersebut dipandang sebagai akibat dari tiga konsiderasi yang mempengaruhi para pengambil kebijakan luar negeri:

- Pertama, kondisi politik dalam negeri termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku politik manusianya.
- Kedua, situasi ekonomi dan militer negara termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan dan keamanan.

⁸ William D. Coplin, *Pengantar Politik Internasional Satu Telaah Teoritis*, edisi kedua, terjemahan Marseles Marbun, Bandung, Sinar Dunia Bandung, 1992, hal 30

- Bab III : Membahas tentang kebijakan politik yang diambil oleh RRC terhadap Taiwan melalui kebijakan satu China, tekanan militer dan munculnya Undang-Undang Anti Pemisahan Diri.
- Bab IV : Membahas upaya peningkatan kekuatan militer Taiwan baik berupa program-programnya serta dukungan dari Amerika Serikat.
- Bab V: Bab ini berisi penutup yang merupakan kesimpulan dari semua pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab sebelumnya.